

## REKAP 1: K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

#### TAHUN ANGGARAN 2022

##### 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

##### 2. VISI

Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

##### 3. MISI

- Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
- Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas

##### 4. PRIORITAS NASIONAL

| KODE  | PRIORITAS NASIONAL                                                                | ALOKASI 2022 (RIBU) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01    | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan   | 3.966.383,0         |
| 02    | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan        | 200.074.130,0       |
| 03    | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing                    | 14.568.438,0        |
| 04    | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                        | 2.188.400,0         |
| 05    | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 10.869.641,0        |
| 07    | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik              | 133.076.418,0       |
| Total |                                                                                   | 364.743.410,0       |

##### 5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

| KODE  | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L                                                                          | TARGET 2022                                                       | ALOKASI 2022 (RIBU) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01    | Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia                                                                                            |                                                                   | 135.250.000,0       |
| 01.01 | Indeks Demokrasi Indonesia                                                                                                           | 78,06                                                             |                     |
| 01.02 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu                                                                              | -                                                                 |                     |
| 01.03 | Indeks Kinerja Ormas                                                                                                                 | 62,0                                                              |                     |
| 02    | Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah                                                                            |                                                                   | 6.200.000,0         |
| 02.01 | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi                                                                                             | 2,39                                                              |                     |
| 02.02 | Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)                                                                                                | 67,3                                                              |                     |
| 02.03 | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi                                                                                              | 2,875                                                             |                     |
| 02.04 | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya                                                                                        | 2,320                                                             |                     |
| 03    | Meningkatnya kewaspadaan nasional                                                                                                    |                                                                   | 6.660.488,0         |
| 03.01 | Indeks Kewaspadaan Nasional                                                                                                          | 62,0                                                              |                     |
| 04    | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas                                                                                |                                                                   | 32.117.734,0        |
| 04.01 | Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"                                                          | 50,0                                                              |                     |
| 04.02 | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas                                                                     | 20,0                                                              |                     |
| 05    | Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri                                                           |                                                                   | 695.572.990,0       |
| 05.01 | Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun                                    | 60,0                                                              |                     |
| 05.02 | Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri                                                                                 | Level 3 (85%)                                                     |                     |
| 05.03 | Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional                                                                                              | Level 3 (85%)                                                     |                     |
| 05.05 | Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni                                                                                  | 3,30                                                              |                     |
| 06    | Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah                                                                      |                                                                   | 5.886.295,0         |
| 06.01 | Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                                                      | Nilai 78 (Tinggi)                                                 |                     |
| 07    | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif                                 |                                                                   | 406.869.683,0       |
| 07.01 | Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                      | Nilai 78 (Tinggi)                                                 |                     |
| 07.02 | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                                   | Nilai 3,0 (Tinggi)                                                |                     |
| 07.03 | Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM                                                                                | 70,0                                                              |                     |
| 07.04 | Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Nilai 60 (Sinkron)                                                |                     |
| 07.05 | Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"                                          | 45,0                                                              |                     |
| 07.06 | Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                         | 36,5                                                              |                     |
| 07.07 | Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi                                                                         | 24,0                                                              |                     |
| 07.08 | Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"                                                     | 110,0                                                             |                     |
| 07.09 | Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah                                                                                                | 90,0                                                              |                     |
| 07.10 | Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah                                                                                                  | Nilai 80 (B)                                                      |                     |
| 08    | Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan |                                                                   | 512.082.565,0       |
| 08.01 | Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil                                                          | 94% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan |                     |
| 08.02 | Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)      | 2.523 Lembaga Pengguna                                            |                     |
| 09    | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan                                                                                 |                                                                   | 106.362.575,0       |

| KODE  | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L                                                                                      | TARGET 2022 | ALOKASI 2022 (RIBU) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 09.01 | Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan                                                                                                   | 20,0        |                     |
| 10    | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri                                                                 |             | 1.301.912.130,0     |
| 10.01 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri                                                                                              | Nilai 89.01 |                     |
| 11    | Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas                                                                            |             | 7.876.459,0         |
| 11.01 | Indeks pengawasan Internal                                                                                                                       | 90          |                     |
| 11.02 | Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus                                                                                                             | 82          |                     |
| 12    | Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri |             | 7.127.055,0         |
| 12.01 | Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri                                      | 55%         |                     |
| Total |                                                                                                                                                  |             | 3.223.917.974,0     |

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

| KODE   | PROGRAM                                                  | INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022 |              |     |               |     |     |              |     |      |     |                 | PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) |                 |                 |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|------|-----|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|        |                                                          | RP                            | PNBP         | BLU | PLN           | RMP | PDN | HIBAH        | PH  | SBSN | HN  | TOTAL           | 2023                       | 2024            | 2025            |
| 010.CM | Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 327.430.744,0                 | 38.309.095,0 | 0,0 | 211.719.864,0 | 0,0 | 0,0 | 24.597.019,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 602.056.722,0   | 633.275.744,6              | 766.532.182,0   | 813.085.075,0   |
| 010.CP | Program Tata Kelola Kependudukan                         | 512.082.565,0                 | 0,0          | 0,0 | 0,0           | 0,0 | 0,0 | 0,0          | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 512.082.565,0   | 487.064.724,4              | 503.673.570,9   | 520.848.901,3   |
| 010.CR | Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum          | 148.110.488,0                 | 0,0          | 0,0 | 0,0           | 0,0 | 0,0 | 0,0          | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 148.110.488,0   | 756.078.357,0              | 766.623.557,0   | 771.148.457,0   |
| 010.WA | Program Dukungan Manajemen                               | 1.945.897.155,0               | 15.771.044,0 | 0,0 | 0,0           | 0,0 | 0,0 | 0,0          | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 1.961.668.199,0 | 2.155.818.886,0            | 2.561.788.269,0 | 2.324.953.673,0 |
| Total  |                                                          | 2.933.520.952,0               | 54.080.139,0 | 0,0 | 211.719.864,0 | 0,0 | 0,0 | 24.597.019,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 3.223.917.974,0 | 4.032.237.712,0            | 4.598.617.578,9 | 4.430.036.106,3 |